

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan diseluruh belahan dunia merupakan sektor yang sangat menentukan regenerasi dari suatu bangsa tersebut. Pasalnya, pendidikan bukan hanya untuk membentuk individu penerus bangsa, namun juga untuk menentukan arah dan gerakan bangsa dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Pendidikan dimulai dari organisasi terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Dan faktanya, seperti ditulis oleh Hart (1990, hal. 59) bahwa tidak ada keraguan tentang konteks rumah menjadi lingkungan sosialisasi keagamaan yang berprestasi. Pun demikian dengan Indonesia. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia (Sanaky, 2008, hal. 15). Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun proses-proses pemberdayaannya. Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut.

Disisi lain, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan rata-rata persebaran di tiap-tiap provinsi adalah sebanyak 77,4% (Statistik, 2010). Idealnya, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia tidak kewalahan dalam mengatasi masalah-masalah bangsa melalui pendidikan yang bermuatan moral dan akhlak. Revolusi mental yang digagas oleh pemerintahan era sekarang dan kemudian diwujudkan dengan pendidikan karakter (akhlak) menjadi *grand-solution* di dua tahun ke belakang. Kendati demikian, Indonesia masih menyisakan masalah-masalah yang tak kunjung teratasi, dari mulai pendidikan hingga urusan agama. Menurut Taufik (2007, hal. 193), dilihat dari segi sarana dan fasilitas kehidupan beragama seperti masjid, mushala,

pesantren, madrasah, sekolah, hingga tingkat perguruan tinggi Islam pun
terbanyak. Dari segi

ketersediaan sumber daya alam pun Indonesia pernah dijuluki sebagai negeri bagaikan kepingan Surga. Namun pada kenyataan lain menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam deretan negara yang terbelakang.

Dalam dunia pendidikan, Indonesia pun belum sepenuhnya terlepas dari masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Baik pada tatanan struktural maupun fungsional. Dapat dilihat dalam beberapa tahun ke belakang, Indonesia setidaknya telah tiga kali berganti kurikulum yang digunakan seiring pergantian pemerintahan. Hal tersebut seakan menunjukkan pada bangsa Indonesia bahwa pendidikan di Indonesia merupakan *project* semata, bukan tugas konstitusi dan kemanusiaan. Tak hanya sampai disitu, para pelajar Indonesia yang kerap turun ke jalan pun menjadi sorotan banyak pihak. Jelas saja, turun ke jalan bukan dalam rangka mengemukakan pendapat atau aspirasi seperti yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia, namun untuk saling menunjukkan yang lebih kuat dengan cara saling lempar batu dan bom molotov dengan pelajar lain dan lain-lain. Hal demikian sering disebut dengan “tawuran”. Padahal, seperti di negara kincir angin seperti yang juga dituliskan oleh Hart (1990, hal. 60) dalam jurnalnya, bahwa instrumen kontrol sosial yang sangat kuat, menembus hampir semua sektor masyarakat Belanda. Ini juga merupakan faktor utama dalam menentukan konsentrasi penyediaan pendidikan dalam konteks denominasi (pembagian sekte atau ormas dalam protestan), terutama karena ada hubungan yang kuat antara keluarga, pendatang, sistem pendidikan, media massa, organisasi rekreasi dan komunitas denominasi. Dari keterangan tersebut, dapat dipahami perlu adanya integrasi yang terstruktur dari seluruh elemen kemasyarakatan dan pemerintah.

Mendalami soal pendidikan dan permasalahannya yang terjadi di Indonesia seperti sekarang ini, tentu kita harus secara menyeluruh dalam memahami pendidikan Indonesia. Seperti menilik dari sisi perencanaan, sisi pelaksanaan, dan sisi hasil. Ketiga sisi tersebut termaktub dalam satu bingkai pendidikan, yakni Model Pendidikan.

Pun demikian dengan pendidikan islam. Dalam dunia pendidikan islam, pendidikan merupakan salah satu media atau model dalam menyampaikan ajaran

islam ke anak didik sejak dini, baik ke dalam rohaniahnya maupun jasmaniahnya. Seperti kata Cucos yang dikutip oleh Barna (Ionel Ene, 2015) bahwa pendidikan agama bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan agama seorang individu, yaitu, dalam istilah Cucos, sebuah turunan psikis dari iman (*Asasiyah*), dalam prinsip tertinggi (*Aqidah*), dan tingkah abadi dan tidak dapat diubah (*Akhlaq*). Pendidikan sebagaimana menurut Asy-Syaibani (2014, hal. 3), merupakan sebuah upaya untuk membantu manusia dalam menyingkapkan, membuka, dan mengembangkan kesiapan, bakat, minat, dan kemampuannya; mengarahkan dan membimbing manusia dalam mencapai tujuan yang baik bagi dirinya dan masyarakatnya; mendorong terjadinya berbagai perubahan perilaku yang dikehendaki, baik secara individual maupun sosial; termasuk menyiapkan manusia untuk menghadapi kehidupan sosial yang sukses.

Sedangkan menurut Hasbullah (2008, hal. 1) dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Dan dipertegas kembali oleh Ihsan (2010, hal. 5) yang menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan menuju tingkat kedewasaan.

Tujuan pendidikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yaitu:

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (RI, 2010, hal. 2).

Berdasarkan pernyataan diatas, menurut uci (2012, hal. 124) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kemandirian merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan. Pendidikan nasional tidak hanya

bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allāh Swt, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, akan tetapi bertujuan pula membentuk peserta didik yang mandiri. Tujuan pendidikan nasional di atas merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan pendidikan karakter, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Dijelaskan pula oleh Hasbullah (2008, hal. 179), secara eksplisit fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 1989, yang menyebutkan “Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional”.

Dari rumusan tersebut, tampaknya terdapat konsistensi dan keterkaitan langsung antara rumusan fungsi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 1989 yaitu: “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...”

Menurut Hasbullah (2008, hal. 179), hal tersebut dipertegas kembali pada penjelasan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.

Lanjut Hasbullah (2008, hal. 179), Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itulah pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

Lanjut Hasbullah juga dalam tulisnya (2008, hal. 180), pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama madrasah serta pondok pesantren telah berakar, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Hasbullah (2008, hal. 182) berpendapat bahwa dalam kurikulum pendidikan, pendidikan keagamaan merupakan bagian terpadu yang dimuat dalam kurikulum pendidikan maupun melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari pendidikan nilai. Oleh karena itu, nilai-nilai agama akan selalu memberikan corak kepada pendidikan nasional.

Namun kendati demikian, maraknya permasalahan yang kian menjadi ini menimbulkan banyak keresahan dihati para orang tua. Sebagaimana diungkapkan oleh Furqan (Rektor UPI) (2016, hal. 1) yang mempertanyakan adanya indikasi kesalahan dalam sistem pendidikan Indonesia. Terkait dengan apa alasan munculnya fenomena murid yang tidak memiliki rasa takzim terhadap gurunya. Juga mengenai berhasil atau tidaknya pola pendidikan yang diterapkan di Indonesia sekarang. Padahal, beberapa dekade terakhir ini, berbagai komponen dan aspek pendidikan telah mengalami kemajuan. Kurikulum dan strategi pembelajarannya pun selalu ditinjau dan diperbaharui hampir setiap tahun.

Pada kenyataan dilapangan pula, jika kita menilik enam bulan ke belakang, dunia pendidikan Indonesia juga kerap digemparkan dengan kejadian-kejadian dari para akademika Indonesia, seperti seorang mahasiswa yang membunuh dosennya, pelajar sekolah menengah atas yang kedapatan mesum dikamar ganti di suatu mall di Surabaya, dan yang terbaru seperti yang disiarkan oleh Liputan6.com (Fithriansyah, 2017) bahwa menurut Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 9 persen pelajar yang ada di Indonesia sudah anti-Pancasila. Tuturnya, “Sembilan persen pelajar sudah anti-Pancasila. Ini PR kita. Saya ketemu yang dideportasi dari Turki, yang anak-anak dan ibu-ibu dikirim Densus ke Kemensos. PR kita adalah tidak mudah kafirkan. Kita bersyukur ada NU dan Muhammadiyah yang ajarkan *tawassuṭ*, *tawazzun*, *itidal*, dan *mabādi khoiro ummah*. Itu PR agar orang tidak mudah berguru kepada 'gadget' yang tidak jelas sanad atau perawi. Karena kalau

soal agama bisa berbahaya,”. Dan yang tidak kalah mencengangkan ialah seperti yang dilansir oleh BNPT melalui CNN Indonesia (Armenia, 2016),

“Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saut Usman Nasution menyatakan terdapat 19 pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan doktrin bermuatan radikalisme. Saut menjelaskan, dari hasil proses profiling timnya di lapangan, 19 pondok pesantren itu terlihat mendukung dan menyemaikan ajaran radikalisme di Indonesia. Oleh sebab itu ia berencana membicarakan temuan tersebut dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas-ormas Islam.”.

Menurut Nata (2008, hal. 18), banyak pelajar yang terlibat dalam perbuatan yang kurang terpuji seperti tawuran, pencurian, penodongan, penyalahgunaan obat narkotika, dan sebagainya. Semua perbuatan yang dapat menghancurkan masa depan pelajar ini penyebab utamanya adalah kekurangan bekal pendidikan agama.

Kekurangan bekal pendidikan agama sejak dini mengakibatkan banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Maka dari itu, peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut tentang peranan pendidikan agama di sekolah-Asrama yang berbasis Pesantren dengan judul **“Model Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam¹”**. Madrasah Dār Al-Arqam dipilih dengan alasan madrasah tersebut merupakan sekolah-asrama berbasis Pesantren yang didalamnya mengajarkan pendidikan agama lebih banyak karena notabene Lembaga tersebut berafiliasi dengan salah satu organisasi masyarakat keagamaan besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Bukan hanya melalui mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, namun juga terselip di setiap mata pelajaran lainnya, juga karena sistem asrama yang diberlakukan di madrasah tersebut yang merupakan ciri khas dari islam nusantara yakni pesantren, dengan harapan dapat mengetahui perencanaan, proses, dan hasil pendidikan agama di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam sehingga dapat meminimalisir perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak dan kalangan remaja. Terlebih Madrasah Dār Al-Arqam juga sekolah dengan basis pendidikan pesantren, tentu dalam upaya yang hendak dituju sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan (*ukhuwwah*).

¹ Penulisan yang dimaksud dengan transliterasi ini yang benar dari دارالرقم adalah **Dār Al-Arqam**. Penulisan tersebut berdasarkan pada EYD yang benar dan berpacu pada pedoman transliterasi yang benar. Sedangkan lembaga yang dimaksud ialah lembaga pendidikan Darul Arqam Muhammadiyah Garut.

Hal ini dapat dibuktikan profil akun resmi sekolah (Visi Misi Sekolah Ma'had Darul Arqam Garut, 2017), dalam Visi dan Misi (poin 3). Madrasah tersebut yang menyatakan bahwa, berisikan

“Menjadi model lembaga pendidikan tingkat nasional yang berwatak kemuhammadiyaan, berwawasan keilmuan, berdaya saing sehingga menghasilkan kader ulama dan berintelektual berahlak mulia penggerak pembangunan berkemajuan islami.”

Dan dalam misi sekolah poin 3 dikatakan

“Mengembangkan sumber daya islami yang dapat menjadi subjek pendidikan yang unggul.”

Selain karena alasan tersebut, seperti dikemukakan oleh Hamdan (2009, hal. 11) tidak banyak orang yang tahu bahwa usia pendidikan Muhammadiyah lebih tua dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Bila meninjau sejarah Muhammadiyah, para peneliti akan menemukan dokumen bahwa KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah tersebut, terlebih dahulu mendirikan sekolah, baru kemudian mendirikan persyarikatan Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 di Yogyakarta dilatarbelakangi keprihatinan Ahmad Dahlan mengenai kondisi umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Menurut Almascaty (2000, hal. 78), sejak awal berdirinya Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan adalah orang pertama yang menggabungkan sistem pendidikan tradisional model pondok pesantren dengan pendidikan sekuler model Barat. Penggabungan ini terjadi dengan asumsi bahwa sistem pendidikan tradisional dan sekuler dapat disatukan menjadi sebuah sistem pendidikan yang sinergi dan dinamis. Dengan model pendidikan ini, KH. Ahmad Dahlan dan para penerusnya berharap akan lahir seorang muslim yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya, sebagaimana yang dilahirkan sistem pendidikan tradisional seperti pondok pesantren, namun memiliki pengetahuan modern yang tidak kalah dengan produk sistem pendidikan sekuler yang didominasi kaum nasionalis dan misionaris Kristen.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka dapat dibedakan ke dalam dua masalah, yakni masalah umum dan dan masalah khusus. Untuk masalah umum dalam penelitian ini ialah, “Bagaimana Model Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam ?”.

Dan adapun yang menjadi masalah khusus dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Perencanaan Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam?
2. Bagaimana Proses Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam?
3. Bagaimana Evaluasi Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Model Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam. Dan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui Perencanaan Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam.
2. Mengetahui Proses Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam
3. Mengetahui Evaluasi Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam mengembangkan teori pendidikan agama dalam pembelajaran PAI, yang digunakan di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam.

2. Secara Praktis
 - a. Lembaga/ Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam

- 1) Sebagai acuan dalam mengembangkan teori pendidikan dalam pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam).
- 2) Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pemahaman dan aplikasi terhadap keberagaman para siswa.

b. Jurusan

- 1) Sebagai inspirasi dalam mengembangkan model pendidikan agama Islam di Prodi IPAI.
- 2) Sebagai cerminan pemahaman pada pembelajaran PAI yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para mahasiswa.

c. Peneliti

- 1) Sebagai motivasi dalam menambah wawasan tentang model pendidikan Islam yang digunakan oleh Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam
- 2) Sebagai penghargaan terhadap keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah tersebut.

d. Umum

- 1) Sebagai penambahan wawasan tentang model pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Putra Dār Al-Arqam
- 2) Sebagai pertimbangan bagi para orang tua untuk memilih Sekolah (Baik Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas) yang berkualitas tinggi dan pembelajaran keagamaan yang baik untuk anak-anaknya.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman secara terstruktur, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut.

BAB I terdiri dari pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II berisi tentang landasan teori yang relevan dengan judul skripsi ini sebagai landasan pemikiran dalam pemecahan masalah.

BAB III berisi tentang metode penelitian, di dalamnya diuraikan tentang desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV ini terbagi ke dalam dua bagian penting, yaitu temuan atau penyajian data yang diperoleh dan pembahasan atau hasil analisis data yang diperoleh tersebut.

BAB V berisi simpulan dari hasil penelitian, implikasi dan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh para pembaca berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan